BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Bungur

Wilayah Desa Bungur berada di ketinggian kurang lebih 80-100 meter di atas permukaan laut. Terletak 7 km arah barat laut kota kabupaten Tulungagung Desa Bungur dengan luas wilayah 754,6 Hektar terdiri dari pekarangan, lahan pertanian dan perkebunan.

Kondisi Geografis Desa Bungur merupakan daratan yang sebagian besar merupakan wilayah pertanian lahan sawah dan perkebunan tebu. Untuk pertanian letak geografis cukup strategis karena Desa Bungur merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangrejo, dengan akses jalan Propinsi sebagai jalan yang cukup padat mobilitasnya.

Desa Bungur berada di ujung selatan wilayah Kecamatan Karangrejo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kauman. Dengan Topografi desa yang terdiri dari dataran dan pegunungan yang subur. Hal menjadi faktor pengembangan pertanian yang potensial dan produktifitas hasil pertanian yang baik.

Pola pembangunan lahan di Desa Bungur lebih di dominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan holtikultura yaitu tebu, jagung, kedelai dan

sebagainya. Dengan penggunaan pengairan tadah hujan dan warga menggunakan sumur pompa diesel.[1]

a. Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi dan berkelanjutan dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program penyediaan sarana dan prasarana pembangunan perekonomian rakyat, pembangunan di desa Bungur diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Selain itu, arah kebijakan pembangunan desa Bungur adalah sebagai berikut:

1) Dibidang sarana dan prasarana pembangunan desa diarahkan pada penyediaan sarana dasar di desa (Gedung sekolah PAUD dan TK) dan jalan desa, jembatan untuk memperlancara arus trasnportasi.
2) Dibidang ekonomi pembangunan desa diarahkan pada pembangunan pasar desa dan ruko desa guna penyediaan lahan untuk berdagang yang memadai, pembinaan UMKM dan Pemasaraannya.

[1] Pemerintah Desa Bungur, *Profil Desa Bungur*, hal. 1

3) Dibidang Sosial Budaya pembangunan desa di arahkan pada penyediaan sarana dan prasarana seperti pengadaan gamelan, dan peralatan hadroh.

b. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekertaris Desa Bungur, diperoleh data sebagai berikut:

a) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Bungur menurut data sensus terdiri dari 2186 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1102 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1089 jiwa. Yang mana jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 682 RTSM. Menurut jenis kelamin jumlah penduduk Desa Bungur dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-Laki	1102
Perempuan	1089
Jumlah	2186

Sumber: Data diolah dari dokumentasi profil desa Bungur 2020

b) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam membentuk pola fikir seseorang. Tingkat pendidikan di Desa Bungur diperngaruhi oleh pola berfikir dan mata pencaharian penduduk yang mana sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total
SD	892
SMP	746
SMA	511
PT	37
Jumlah	2186

Sumber: Data diolah dari dokumentasi profil desa Bungur 2020

Pada abel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Bungur sangat memprihatinkan, dimana hampir 41% penduduknya hanya menempuh pendidikan sampai tamat di sekolah dasar. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penduduk di desa Bungur bermata pencaharian sebagai buruh tani.

c. Kondisi masyarakat Desa Bungur

a) Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Bungur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memperolah penghasilan dari mengelola sumberdaya alam disekitar. Umumnya masyarakat di Desa Bungur berprofesi sebai petani, yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian.

Tabel 4.3
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

Pekerjaan	Jumlah
Petani	1237
PNS-TNI/POLRI	56
Pedagang	30
Karyawan	315
Buruh	211
Lain-lain	500

Sumber: data diolah dari profil Desa Bungur 2020

Dikarenakan Desa Bungur merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, maka sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini juga terlihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa sebanyak 1237 jiwa berrofesi sebagai petani.

Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Bungur belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang pokok yang tidak seimbang dengan penghasilan yang mereka dapat. Selain itu minimnya bekal ketrampilan yang dimiliki dan upah buruh yang dibawah standart serta harga kebutuhan pokok yang mahal, menyebabkan kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan[2].

2. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bungur

a. Sejarah PKH di Desa Bungur

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program keluarga harapan (PKH) sejak tahun 2007 sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional. PKH dalam jangka pendek diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan untuk jangka menengah, PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan

[2] Wawancara Bapak Hari Tricahyono, Sekertaris Desa Bungur pada 10 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas. Kemudian dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.[3]

Dengan adanya program PKH dari pemerintah Indonesia ini di Desa Bungur yang dirasa kurang mampu/miskin akhirnya di masukan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana untuk memperoleh bantuan program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, karena bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)[4]. Bantuan ini tidak diberikan dengan cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima yang telah ditentukan oleh pemerintah.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Menurut sekertaris desa Bungur, program keluarga harapan dilaksanakan sejah tahun 2007. Awalnya jumlah KPM tidak mencapai 100 RTSM. Tetapi seiring berjalannya PKH selama hampir 14 tahun

[3] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

[4] *Ibid.*,

pelaksanaanya jumlah tersebut bergerak secara fluktuatif sesuai pemutakhiran data pada data terpada kesejahteraan sosial (DTKS).

a) Penerima PKH dan Kewajiban Peserta PKH

1. Penerima PKH

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan termasuk dalam salah satu dari tiga kaegori yaitu kategori kesehatan yang meliputi ibu hamil/nifas dan anak usia dini, kategori pendidikan yang meliputi anak sekolah usia SD-SMA, dan kategori kesejahteraan sosial yang meliputi lansia usia 70+ dan penyandang disabilitas berat.[5] Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebu digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH[6].

Berikut besaran jumlah dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dijabarkan dalam data berikut:

---

[5] *ibid.*,

[6] Kementrian Sosial RI, *"Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021"*, (Jakarta: Kemensos RI, 2021), hal. 15

Tabel 4.4

Indeks komponen bantuan sosial PKH tahun 2021[7]

Kategori	Indeks/tahun (Rp)	Indeks/3 bulan (Rp)
Ibu Hamil	3.000.000	750.000
Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
Anak Sekolah SD	900.000	225.000
Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

Sumber: data pendamping PKH

a. Kewajiban Peserta PKH

Peserta PKH memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan serta dalam pemberdayaan ekonomi. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan bagi lansia, pemberian asupan gizi serta imunisasi bagi balita sehingga dapat mengurangi angka kematian akibat penyakit. Kewajiban terkait bidang pendidikan yaitu terdaftar disekolah kesetaraan dan wajib memiliki presentase kehadiran sebesar 85%.[8]

Dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH sesuai dengan yang disebutkan dalam wawancara dengan pendamping PKH desa Bungur:

> Sebagai KPM juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan selama menjadi anggota PKH. Kewajiban tersebut meliputi dua komponen yaitu komponen kesehatan dan komponen pendidikan. Untuk komponen kesehatan seperti melakukan pemeriksaan rutin untuk ibu hamil serta melahirkan di tempat

[7] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

[8] *ibid.,*

> fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Untuk anak balita harus melakukan pemeriksaan kesehatan pada usia satu bulan pertama minimal tiga kali, melakukan imunisasi lengkap, serta melakukan penimbangan berat badan rutin. Untuk lansia harus memeriksakan kesehatan rutin. Lalu untuk komponen pendidikan, untuk anak sekolah SD-SMA harus terdaftar disekolah yang setara sesuai jenjang dan minimal meiliki presensi kehadiran sebanyak 85% dalam setahun.[9]

Dalam implementasi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu[10]. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi program PKH ini. Untuk itu peran pelaksana teknis dalam melakukan monitoring program ini sangat diperlukan.

Hal ini sesuai pernyataan dari pak Hari selaku sekertaris desa Bungur, menyatakan bahwa:

> Memang masih ada beberapa warga yang dapat dikatakan sejahtera menerima bantan ini, tetapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena semua tergantung pada pusat, ya kalau KPM yang tergolong sudah sejahtera tersebut tidak mengundurkan diri kami pemerintah desa tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu peserta tersebut dicoret secara otomatis dari daftar penerima PKH.[11]

---

[9] *Ibid.,*

[10] Wawancara Bapak Hari Tricahyono, Sekertaris Desa Bungur pada 10 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

[11] *Ibid.,*

b) Penentuan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Proses penentuan menjadi anggota PKH di Desa Bungur diambil dari DTKS (*Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*) yang berasal dari pemerintah pusat sebagai acuan resmi pemelihan calon penerima PKH. Setelah jumlah terpilih dari DTKS maka akan dilakukan proses verifikasi dan proses validasi yang akan menghasilkan siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan PKH. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Danang selaku pendamping PKH Desa Bungur:

> Proses untuk menjadi anggota PKH tidak melalui pendaftaran mandiri, tetapi melalui penunjukan langsung yang mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selanjutnya dilakukan validasi data oleh pihak yang berwenang dimana dalam hal ini adalah pendamping sosial PKH yang dibantu oleh perangkat desa setempat. Setelah dilakukan proses validasi selanjutnya adalah proses verifikasi sebagai akhir proses penentuan untuk menjadi anggota PKH.[12]

Kemudian jika dalam satu keluarga ada kriteria komponen penerima PKH yang sudah tidak termasuk kategori penerima biasnya pserta PKH tersebut akan dihilangkan. Namun tetap mendapatkan bantuan PKH sesuai kriteria yang masih ada atau yang termasuk dalam penerima PKH. Untuk itu biasanya dilakuka survey dalam pendataan penerima PKH yang dilakukan pendamping PKH walaupun ada pertemuan rutin yang diadakan 2 kali dalam setahun.

[12] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Danang selaku pendamping PKH sebagai berikut:

> Pendamping juga melakukan survey dalam pendataan yang dilakuakan 1 bulan seklai yang mana guna mengetahui kriteria penerima PKH sudah termasuk harus diputuskan atau masih berlanjut. Dan data biasanya ada pembaharuan setahun 2 kali. Untuk survey yang dilakukan adalah mendatangi secara langsung dari daftar nama-nama yang tercantum dalam DTKS, mecocokan nama dan dilihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kreiteria penerima PKH. Data yang sudah didapatkan kemudian diserahkan kembali pada tim pengelola data yang juga dibagi dalam dua tim, yaktu tim pencacah lapangan serta pemeriksa dan pengawas. Data tersebut dilihat sejauh mana konsistensi dari hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat.[13]

Dalam menganalisis ketepatan sasaran, maka dapat dilihat secara sederhana dengan melihat beberapa indikator yangdigunakan untuk menentukan sasaran PKH di Desa Bungur yaitu:

1) Pendapatan rumah tangga, hal ini didasarkan karena tingkat pendapatan masyarakat per kapita yang dimasukkan dalam indikator kemiskinan, miskinan memang terhapus dengan adanya tingkat pendapatan, masyarakat dengan itu dapat sebagi titik tolak atau modal bagi perkembangan ekonomi selanjutnya.
2) Pengelauran rumah tangga, hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan diukur dengan melihat pada sisi pengeluaran masyarakat. Karena BPS menggunakan definisi penduduk

[13] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

miskin sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

3) Kepemilkian aset. Kepemilikan aset jga berkaitan denga sejauh mana aset-aset pribadi yang dimilki. Karena pengentasan kemiskinan tidak selamanya berasal dari kejijakan saja melainkan juga persoalan yang sidatnya struktural, yang berarti sesorang yang berusaha sekeras apapun maka hasilnya tidak ada artinya karena kendala struktural yang dihadapi. Misalnya keterbatasan infrastruktur yang memadai dan dapat menunjang kebutuhan hidup mereka.
4) Keadaan tempat tinggal atau rumah. Kondisi rumah yang dimaksudkan disisni adalah berupa gaungan antara indikator yang terdiri dari status kepemilikan rumah, keadaan dinding, lantai, kamar mandi atau sanitasi dan penggunaan bahan bakar.

Dengan demikian untuk sasaran penerima PKH di Desa Bungur sudah berusaha maksimal namun dalam data yang didapatkn dari pusat tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan kurangnya komunikasi. Sehingga dapat dilihat bahwa untuk menwujudkan kesejahteraan masyarakat maka hubungan antara pemerintah desa dan pelaksana teknis PKH harus terjalin dengan baik.

Hal ini juga diungkap oleh Pak hari, sekertaris desa Bungur bahwa:

Untuk menjadi anggota PKH itu bukan ditunjuk oleh pemerintah desa, tapi dari pelaksana teknis PKH sendiri sudah ada beberapa

nama yang berasal dari DTKS lalu membantu dalam proses validasi, selanjutnya urusan dapat atau tidaknya itu menjadi keputusan langsung dari pusat"[14]

Kegiatan yang pasti dilakukan oleh PKH setiap saat yaitu validasi data yang dalam hal ini berkaitan dengan data kehamilan, kematian dan juga putus sekolah. Hal ini juga diungkapkan oleh pendamping PKH desa Bungur sebagai berikut:

> Kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh PKH dalam rangka pembangunan adalah validasi data. Bagi yang hamil sejak dini akan dilakukan validasi dengan harus melaporkan surat keterangan hamil. Begitupun juga bagi yang meninggal dunia dan juga yang putus sekolah harus dilakukan validasi setiap saat.[15]

Selanjutnya dari proses verifikasi data penerima bantuan PKH ini akhirnya menghasilkan jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Desa Bungur sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah penerima manfaat PKH di Desa Bungur tahun 2016-2020

Tahun	2017	2018	2019	2019	2021
Jumlah penerima PKH	347	343	339	339	341

Sumber: data dari pendamping PKH Desa Bungur

c) Pertemuan Awal dan Sosialisasi

Menurut Hari Tricahyono selaku sekertaris Desa Bungur, dalam penerapan PKH ini terlebih dulu diadakan suatu sosialisasi terhadap masyarakat Desa Bungur, guna memberikan pemahaman tentang Program Keluarga Harapan. Namun, sosialisasi tersebut

[14] Wawancara Bapak Hari Tricahyono, Sekertaris Desa Bungur pada Senin, 10 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

[15] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

hanya dilakukan satu kali saja sebelum salaon KPM menjadi KPM, jadi untuk perkembangannya tidak ditnjau lagi dari pemerintah.[16]

Hal ini sama dengan pernyataan pendamping PKH, bahwasannya sudah melakukan sosialisasi. Menurut Danang, setelah sosialisasi dilakukan kemudian dilakukan pertemuan awal antara pendamping dengan para calon penerima bantuan. Pada pertemuan awal diisi dengan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan PKH yang meliputi konsep dan tujuan PKH, selain itu persyaratannya serta proses pencairan bantuan PKH. Berikut pernyataan pendamping PKH mengenau hal tersebut:

> Iya, sebelum mereka menjadi peserta PKH mereka akan memenuhi pertemuan awal dan kemudian diproses Validasi. Dipertemuan awal biasanya pendamping menyampaikan syarat-syarat, hak dan kewajiban serta cara mencairkan dana bantuan. Untuk lokasi sosialisanya itu di balai desa.[17]

Dalam proses pertemuan awal dihadiri oleh hampir semua calan KPM PKH yang terdiri dari ibu-ibu sasaran utama PKH maupun oleh beberapa lansia yang mejadi calin KPM PKH tersebut. setelah lama diterapkan yaitu sekitar hampir 14 tahun, terdapat beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bungur salah satunya kendala dalam pelaksanaan program. Seperti dalam pernyataan pendamping sebagai berikut:

---

[16] Wawancara Bapak Hari Tricahyono, Sekertaris Desa Bungur pada Senin, 10 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

[17] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

> Kendala tentu ada, sebagian contoh kendala yang sering terjadi biasanya kartu ATM terblokir ataupun tertelan mesin ATM saat mereka melakukan pencairan bansosnya. Mereka harus berkunjung ke Bank untuk mengurusnya, biasanya yang mengalami kendala KPM Lansia. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pihak desa dengan bagian pusat, misalnya data yang dikirim akan berbeda dengan data yang keluar.[18]

Berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH desa Bungur terdapat kendala dalam pelaksanaan PKH di Desa Bungur yaitu:

1) Kendala teknis. Saat pencairan dana PKH banyak terjadi kesalahan teknis seperti kartu ATM terblokir, PIN yang tidak salah ataupun kartu tertelan mesin ATM.
2) Kendala msyarakat. Menurut pendamping program ini terdapat kendala yaitu pola pikir masyarakat tentenag program yang mengaggap bahwa semua program yang diturunkan pemerintah harus diterima seluruh masyarakat. Hal ini akan menimbulkan potensi konflik sehingga para pendamping harus memilki manajeman yang baik dalam mengatasi maslah masyarakat tersebut.

Dalam implementasi program keluarga harapan ini belum sepenuhna sesuai dengan ekspektasi seperti dalam hasil wawancara dengan salah satu peserta PKH berikut:

> Saya tahunya PKH itu ya bantuan dari pemerintah. Terus kalau ngambil bantuannya itu lewat ATM. Bantuan ini saya dapatkan setiap 3 bulan sekali. *Alhamdulillah*, perekonomian saya sedikit terbantu dengan adanya bantuan ini.[19]

---

[18] *Ibid.*,

[19] Wawancara Ibu Parti selaku anggota PKH pada 20 Mei 2021 pukul 14.00 WIB

Dari hasil wawancara dengan salah satu penerima program tersebut, rata-rata KPM lainnya berpendapat sama dengan pendapat Ibu Parti. Dengan demikian penerapan program ini belum sepenuhnya dikatakan efektif, karena masih banyak keluhan yang dirasakan masyarakat dan masih banyak juga ketidaktepatan sasaran dalam penerima bantuan PKH.

Di desa Bungur sendiri banyak ditemukan masyarakat yang kurang memahami arti/tujuan dari PKH ini sehingga dalam pemanfaatannya kurang efektif dan efisien. Walaupun dengan pengambilan dana bantuan dilakukan dengan kartu atm tetap saja meresahkan warga hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat yang kurang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hal ini dapat membuat beberapa oknum memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan pribadi.

2. Implikasi Program Keluarga Harapan di Desa Bungur

Implikasi dalam penelitian ini meneliti bagaimana PKH dapat mengentaskan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan program. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan implikasi program keuarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

a. Peningkatan Ekonomi

Penduduk desa Bungur untuk memenuhi kebuputah hidupnya bergantung pada penghasilan bertani dan sebagai buruh. Penghasilan dari kedua matapencaharian utama ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya saja masih kurang memenuhi kebutuhan lainnya sepertu perumahan layak ataupun sanitasi yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keluarga sangat miskin masih memilki kesuliatan untuk memeuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki matapencaharian karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya.

Hadirnya program pengentasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH karena PKH hanya memberikan kepada mereka ibu hamil dan anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka serta memberikan fasilitas kesehatan bagi lansia. Kemudian pada anak-anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Namun, adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban si miskin, karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk anak sekolah mereka sehingga

pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakain dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal mereka.

Pada dasarnya menurut bapak Danang selaku pendamping PKH desa Bungur, PKH sendiri mempunyai tujuan utama yaitu seperti yang telah beliau sebutkan yaitu:

> Pemberian bantuan kepada keluarga penerima manfaat PKH bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan dapat sedikit membantu meningkatkan perekonomian.[20]

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hari selaku sekertaris desa Bungur juga menyampaikan pendapatnya mengenai tujuan utama PKH, beliau berpendapat bahwa:

> Tujuan utama dari PKH sebenarnya sangat mulia yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan fsilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan, walau tidak banyak setidaknya dua komponen dasar tersebut terbantu untuk dipenuhi[21]

Manfaat PKH secara umum adalah dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi anggota yang memiliki komponen anak sekolah dan komponen yang lain sangat terbantu dalam pemenuhan fasilitas kesehatan. Sehingga pendapatan yang diperoleh RTSM dapat digunakan untuk

---

[20] *Ibid.*,

[21] Wawancara Bapak Hari Tricahyono, Sekertaris Desa Bungur pada Senin, 10 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

memenuhi kebutuhan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Ibu Giwah menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

> Manfaat PKH sangat membantu meringankan biaya pendidikan anak sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, tetapi setidaknya PKH sudah membantu meringankan tanggungan sekolah entah untuk membeli buku atau untuk keperluan sekolah lainnya. Saya sudah menerima bantuan PKH sejak tahun 2010. Dan selama selama ini saya merasa terbantu dengan adanya program PKH ini untuk biaya sekolah, selain itu di PKH ini juga diberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan permasalah-permasalah sehari-hari.[22]

Manfaat PKH secara umum juga dirasakan oleh peserta PKH lainnya yaitu Ibu Anis yang berpendapat sebagi berikut:

> Saya menerima bantuan ini sejak tahun 2019, Alhamdulillah saya menerima bantuan untuk pendidikan anak saya yang masih SMP dan dapat bantuan juga untuk anak saya yang nomer dua yang masih balita. Bantuan PKH ini sangat membantu saya mbak, apalagi dimasa pandemi seperti sekarang[23]

Terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini telah dipaparkan oleh salah satu peserta PKH yaitu Ibu Murtinah:

> Dengan adanya bantuan PKH ini saya sangat bersyukur, karena bisa membantu biaya sekolah untuk 2 anak saya. Pekerjaan saya serabutan begitupun dengan suami saya. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah ngepres, apalagi untuk biaya sekolah, belum lagi untuk kebutuhan lain-lain yang juga tidak sedikit

---

[22] Wawancara dengan Ibu Giwah Giarti selaku penerima PKH sekaligus Ketuan Kelompok PKH Desa Bungur pada 20 Mei 2021 pukul 09.30 WIB

[23] Wawancara dengan Ibu Anis Andriani peserta PKH Desa Bungur pada 20 Mei 2021 pukul 11.00 WIB

> pengeluarannya. Alhamdulillah, dengan menjadi penerima PKH saya dapat terbantu.[24]

Dalam memenuhi kebutuhan pokok RTSM harus terbagi untuk biaya keperluan pendidikan anak-anak. Adanya program PKH ini sekiranya dapat membantu biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah serta dapat memberikan pemenuhan gizi bagi keluarga dan dana sisanya dapat ditabung atau kalau cukup dapat digunakan sebagai modal usaha. Sehingga pendapatan hasil bekerja dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.

Dari komponen lansia juga mendapatkan biaya hidup dari program ini dan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini searah dengan pernyataan pendamping PKH sebagai beikut:

> Mengenai implikasi dampak PKH terhadap masyarakat ya sudah cukup terlihat mbak perubahannya. Perkembangan peserta PKH di Desa Bungur sedikit banyak sudah mengalami banyak perubahan sesuai apa yang diharapkan pemerintah, mulai dari berkurangnya beban mereka untuk pengeluaran hidup, terutama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, pendidikan anak – anak mereka maupun ekonomi mereka.
>
> Dan tidak ketinggalan perubahan perilaku mereka untuk sadar akan kesehatan keluarga mereka cukup tinggi, dan juga untuk mencerdaskan anak anak mereka, dengan melihat hasil minimal anak KPM yang lulus sekolah minimal lulusan SMA bahkan ada juga yang berusaha untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan walaupun melalui jalur bidik misi. Perubahan ketergantungan akan

[24] Wawancara dengan Ibu Murtinah selaku penerima PKH desa Bungur pada 20 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

> bantuan sosial juga sudah mulai berkurang dilihat dari sedikit banyak mereka yang mencoba untuk berusaha bekerja seperti berjualan.[25]

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak penerima bantuan dan pendamping dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan (PKH) berimplikasi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang mana ditandai dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli serta berkurangnya ketergantungan warga terhadap bantuan sosial. Hal ini terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang telah mengalami perubahan pola konsumsi dengan memenuhi kebuthan pokkoknya karena terjadi tambahan pendapatan melalui PKH ini, walaupun tidak seberapa setidaknya bisa merubah pola konsumsinya.

b. Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak

Salah satu tuajan PKH selain kesehatan bagi lansia dan ibu hamil serta balita, PKH juga memberikan akses pendidikan dasar bagi anakanak penerima bantuan. Hal ini diimplementasikan dengan menetapkan ketentuan bagi anak peserta program untuk hadir disekolah minimal 85% kehadiran setiap bulannya. Hal itu dapat berimplikasi terhadap

[25] Wawancara Bapak Danang Nahari Prasetyo, S.Pd.I, pendamping PKH Desa Bungur, pada 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

peningkatan jumlah partisiasi sekolah dan kesadaran bahwa sekolah itu penting.

Selain itu hadirnya PKH ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak yang brasal dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendali dengan biaya sekolah dan kebutuhan penunjanh sekolah lainnya, seperti seraga, sekolah, alat tulis, tas, sepatu, dan kebutuhan lainnya.

Pernyataan diatas selaras dengan pernyataan pendamping PKH tentang dapka PKH terhadap pendidikan di desa Bungur sebagai berikut:

> Untuk dampak PKH terhadap pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah di Desa Bungur. Dengan melihat hasil minimal anak KPM yang lulus sekolah minimal lulusan SMA bahkan ada juga yang berusaha untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan walaupun melalui jalur bidik misi.[26]

Peran Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan, dapat dikatakan sudah cukup maksimal dalam pembagian bantuan atau sudah mencapai sasaran dengan baik karena peran PKH meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Hal itu sesuai dengan pendapat salah satu penerima program keluarga harapan sebagai beikut:

---

[26] *Ibid,*

> Bantuan PKH sangat berperan pada keluarga saya, karena dari awal saya meneriam bantuan ini, Alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga saya, biaya sekolah anak saya dapat tertutupi sehingga pendapatan dari hasil bekerja bisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya.[27]

Adapun dengan bantuan tersebut diahrapakan peran pemerintah penuh dalam hal ini. Pentingnya peran pemerintah daerah serta desa setempat menjadi ukuran keberhasilan program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan. Sejauh mana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari instansi terkait begitu lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi PKH haruslah dapat diminimalisasi dengan itu kedepannya lebih bisa mengintrol keadaan program keluarga harapan tersebut.

C. Analisis Penelitian

1. Implementasi Program Kaluarga Harapan di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Usai melakukan pengamatan dan penelitian terkait implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dapat dikatahui bila implementasi

[27] Wawancara dengan Ibu Murtinah selaku penerima PKH desa Bungur pada 20 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

PKH di daerah ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah, seperti pada beberapa aspek berikut:

a. Penentuan Penerima PKH

Proses penentuan penerima PKH di Desa Bungur dilakukan menurut peraturan pemerintah yaitu dengan cara dinas sosial kabupaten Tulungagung menerima data calon penerima PKH dari pusat yang berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian dilakukan validasi data oleh pendamping PKH Desa Bungur. Proses validasi yang dilakukan tidak hanya menyocokkan nama ataupun data penduduk, tetapi juga dengan melakukan survey secara langsung ke tempat tinggal calon penerima PKH. Dalam survey tersebut, pendamping melakukan proses analisis ketepatan sasaran yang mengacu pada 4 indikator yaitu: 1) pendapatan rumah tengga; 2) pengeluaran rumah tangga; 3) kepemilikan aset; dan 4) kepemilikan rumah. Jika dalam proses validasi calon penerima PKH memenuhi semua indikator tersebut maka selanjutnya pendamping dapat memverifikasi data calon penerima ke pusat yang selanjutnya akan diproses untuk menerima bantuan PKH.

b. Pertemuan Awal dan Sosialisasi

Sebelum menerima bantuan PKH, pendamping melakukan pertemuan awal dengan cara mengumpulkan calon KPM dan memberikan sosialisasi terkait PKH. Dalam pertemuan ini akan dibentuk kelompok untuk memudahkan pembagian waktu

penerimaan bantuan. Pada tahun 2021 di Desa Bungur terdapat 341 KPM yang terdiri dari KPM lama dan KPM baru, jumlah tersebut terbagi menjadi 13 kelompok. Pada kesempatan awal dan sosialisasi ditunujuk pula ketua kelompok yang bertugas untuk menjadi penyampai informasi dari pendamping pada anggotanya.

Tidak hanya di awal sebelum menerima bantuan, tetapi pertemuan dan sosialisasi selanjutnya akan dilakukan pendamping dan para peserta setiap 6 bulan sekali atau diakhir semester. Dalam pertemuan ini, pendamping PKH akan melakukan pengecekan terkait kewajiban yang harus dijalankan peserta PKH.

c. Pencairan Dana Bantuan

Para penerima manfaat PKH di Desa Bungur selanjutnya diberikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang dapat difungsikan sebagai kartu ATM untuk mengambil dana bantuan secara mandiri dan langsung di ATM ataupun e-warung terdekat. Dana bantuan tersebut diberikan setiap 3 bulan sekali, dengan jumlah dana yang sesuai berdasarkan komponen menurut peraturan pemerintah.

d. Kendala Pelaksanaan PKH dan Solusi yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan sebuah program, hal yang selalu dijumpai ialah kendala, tetapi dalam sebuah program bantuan sosial jika ditemukan suatu kendala sebisa dan secepat mungkin pihak yang bertanggungjawab segera menyelesaikan hal tersbut. Begitu

pula pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bungur. Menurut penelitian yang telah dilakukan, kendala yang didapati disini ada 2, berikut kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan saat pelaksanaan PKH di Desa Bungur:

1) Kendala teknis pada saat pencairan dana, seperti PIN ATM yang tiba-tiba terblokir atau kartu yang tertelan mesin ATM. Solusi yang dilakukan adalah mendatangi Bank mitra PKH untuk mengajukan keluhan, selanjutnya pihak Bank akan segera menindaklanjutu aduan tersebut dan membantu menyelesaikan masalah.
2) Kendala masyarakat. Yang dimaksud kendala masyarakat disini ialah kendala pola pikir yang dimiliki masyarakat tentang program yang menganggap bahwa semua program yang diturunkan pemerintah harus diterima seluruh masyarakt. Solusi yang dilakukan dalam kendala ini ialah para pendamping harus memiliki manajemen yang baik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

e. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah salah satu upaya untuk mengetahui apakah proram keluarga harapan dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak pada penerimanya. Monitoring dan evaluasi PKH dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pada

tahap ini dilakukan pula pemutakiran data untuk mengetahui kondisi kesejahteraan terkini keluarga penerima manfaat PKH.

2. Implikasi Program Keluarga Harapan di Desa Bungur

Dalam pelaksanaan sebuah program pastilah akan menimbulkan implikasi atau pengaruh/dampak yang terjadi akibat program tersebut. Begitupula, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bungur juga telah memberikan pengaruh terhadap KPM nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sejauh ini PKH di Desa Bungur memberikan pengaruh yang positif bagi KPM, dampak tersebut yaitu:

a. Peningkatan Ekonomi

Hadirnya PKH dapat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan menerima manfaat PKH, KPM tidak perlu menyisihkan pendapatan mereka untuk keperluan pendidikan maupun keperluan kesehatan karena dua keperluan tersebut sidah ditanggung PKH. Sehinggga, KPM dapat menggunkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan PKH di Desa Bungur telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi KPM, hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli. Meskipun peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang dialami tidak seberapa banyak.

b. Pemenuhan Pendidikan Dasar Bagi Anak

Program Keluarga Harapan memberikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak KPM PKH. Akses pendidikan dasar yang dimaksud disini ialah memberikan dana bantuan setiap 3 bulan sekali sesuai porsi yang disediakan pemerintah. Sebagai imbal balik yang diberikan, anak-anak KPM PKH juga harus melaksankan kewajibannya yaitu belajar dengan giat disekolah yang dibuktikan dengan absesnsi minimal 85% kehadiran disekolah per tahunnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan, PKH di Desa Bungur memberikan pengaruh yang positif terhadap pemenuhan pendidikan dasar bagi anak. Hal tersebut dapat dilihat dari anak-anak KPM PKH yang semuanya bersekolah hingga sekolah menengah atas, bahkan menurut informasi dari pendamping PKH saat ini adapula anak KPM PKH yang tengah melanjutjan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.